



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



**BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BLITAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat, Taufik, Bimbingan, serta Hidayah-Nya, Tim penyusun Perubahan Renja Bappedalitbang tahun 2025 dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Bappedalitbang Kabupaten Blitar tahun 2025 dengan baik.

Penyusunan Renja merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perubahan digunakan sebagai pedoman dan landasan serta rencana untuk mempercepat dan memenuhi capaian target Bappedalitbang tahun 2025 sehingga mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Bappedalitbang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Perubahan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Perubahan Renja sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Perubahan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Blitar, 14 Juli 2025

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN BLITAR



Drs. RULLY WAHYU PRASETYOWANTO, ME.

Pembina Utama Muda
NIP. 19750902-199412 1 002



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| Bab I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 7 |
| Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 | 10 |
| 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan PD | 10 |
| 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD | 11 |
| 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I | 16 |
| Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 32 |
| Bab IV PENUTUP | 42 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kabupaten Blitar | 10 |
| Tabel 2.2 Evaluasi Rencana Kerja PD Kabupaten Blitar | 17 |
| Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kabupaten Blitar | 34 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan jangka pendek tahunan, dalam rangka merealisasikan target kinerja tahun 2025 dan merupakan bagian dari rencana kerja pemerintah daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2024 memuat kerangka kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, sasaran, uraian program kegiatan serta rencana indikatif pendanaannya yang hendak dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar.

Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026. Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2024 pada Bappedalitbang Kabupaten Blitar diharapkan dapat memberikan kontribusi aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025.

Dokumen Perubahan Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu - isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun mengorganisasikan mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam hal ini Bappedalitbang Kabupaten Blitar.

Fungsi Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam membangun daerah. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, serta memuat tujuan dan sasaran renja, memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah akan mengalami penyesuaian sehingga disusun kembali Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam rangka mengatasi kesenjangan dan ketidaksesuaian yang terjadi setelah dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Dalam rangka mencapai target indikator sasaran RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 tersebut, Bappedalitbang menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam waktu 5 tahun yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Indeks Perencanaan dan Meningkatkan Inovasi Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Inovasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut Bappedalitbang menetapkan 3 sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan indikator Persentase Capaian Kinerja RPJMD dan Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%;
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah dengan indikator Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah yang Ditindaklanjuti;
3. Meningkatnya akuntabilitas Bappedalitbang dengan indikator Nilai/Predikat SAKIP Bappedalitbang.

Tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya diarahkan untuk mencapai indikator kinerja. Untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan perlu merumuskan target outcome program dan output yang akan dihasilkan melalui kegiatan dan sub kegiatan yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan Bappedalitbang.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Bappedalitbang Tahun 2025 merupakan:

1. Pedoman bagi Bappedalitbang dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2025.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Alat untuk mencapai target sasaran pembangunan sehingga dapat tercapai tujuan dari pembangunan yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025 akan digunakan sebagai pedoman dan referensi dalam penyusunan program dan kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Blitar pada tahun tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Bappedalitbang tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 19/D).
21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 92/E).
22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P- RKPD) Tahun 2025);
23. Surat Edaran Nomor B/027.02.04.01/209/409.3.2/2025 Tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja Pd) Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan mencapai target program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Sedangkan tujuan dari Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Rencana Strategis Bappedalitbang tahun 2025-2030 ke dalam rencana tahunan;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;

3. Merumuskan strategi pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan evaluasi tahun berjalan dan memproyeksikan ketercapaian target kinerja;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran pagu anggaran kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025 sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 dan Surat Edaran Nomor : B/027.02.04.01/209/409.3.2/2025 tanggal 3 Juli 2025, penyajian dokumen Rancangan Perubahan Renja (P-Renja PD) sekurang-kurangnya disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan P-Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang P-Renja PD, proses penyusunan P-Renja PD, keterkaitan antara P-Renja PD dengan dokumen P-RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan P-APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan P-Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan P-Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Analisa Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan sampai dengan triwulan I dengan mengacu

pada APBD Tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rancangan Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel E-81 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian penjabaran dari Tabel Pendanaan dan Rencana Kerja dari lampiran Renja.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD dan nama dan tanda tangan kepala PD, serta cap instansi pemerintah daerah yang bersangkutan.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Analisa Kinerja Pelayanan Bappedalitbang

Bappedalitbang Kabupaten Blitar melaksanakan fungsi penunjang daerah dibidang Perencanaan dan fungsi penunjang daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan, oleh karena itu, Bappedalitbang tidak termasuk dalam OPD yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Pencapaian kinerja pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Blitar disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar serta Perubahan Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Blitar, Adapun Rekapitulasi dari Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappedalitbang

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | Proyeksi Realisasi | | |
|----|--|--|--------|-----------|----------|--------|---|----------|--------|-----------|----------|--------------------|------|-------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah | Persentase capaian kinerja RPJMD | 80 | 87,29 % | 109 % | 85 | 96 % | 112,94 % | 90 | 90,04 % | 93,79 % | 96 % | 98 % | 100 % |
| | | Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75% | 70 | 89,07 % | 127,24 % | 75 | 97 % | 121,33 % | 85 | 96,23 % | 105,75 % | 91 % | 92 % | 100 % |
| | Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Bappedalitbang | Nilai Predikat SAKIP Bappedalitbang | A | A | 100 % | A |  | 100 % | A | BB | 89,39 % | A | A | A |
| 2 | Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah | % hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti | 25 | 50 % | 200 % | 25 | 70 % | 140 % | 25 | 100 % | 142,86 % | 70 % | 75 % | 80 % |

Sumber : Perubahan Renstra 2021-2026 dan LKJIP 2024

Untuk pengukuran capaian kinerja Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025 beberapa indikator belum bisa disajikan karena dapat dilakukan perhitung pada akhir

tahun 2025, maka yang dapat kami sajikan adalah hasil penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sampai dengan tahun 2024. Analisis kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Capaian Kinerja RPJMD
Belum bisa dilakukan perhitungan menunggu capaian sampai akhir tahun 2025, tetapi sampai dengan tahun 2024 sudah tercapai 90,04%.
2. Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%. Sampai dengan tahun 2024 target 85% dapat tercapai 96,23% sehingga dapat dikategorikan sangat baik.
3. Prosentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti. Sampai dengan tahun 2024 target 25% dapat tercapai 100% sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Tahun 2025 dapat dilakukan perhitungan akhir tahun.
4. Score SAKIP OPD dengan target kinerja nilai SAKIP OPD A tahun 2025 penilaian sementara tercapai BB, turun dari tahun 2024 karena sistem penilaian berbeda karena untuk nilai A tahun 2024 harus menyertakan penghargaan Nasional sedangkan Bappedalitbang sampai dengan tahun 2024 belum meraih penghargaan Nasional.

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang pada tahun 2023 sudah termasuk dalam kategori baik, hal ini tidak lepas dari komitmen Kepala Bappedalitbang beserta jajarannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik guna mengemban Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih terutama Misi ke 3 (tiga), yaitu Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappedalitbang

2.2.1 Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Blitar memiliki peran sentral dalam proses perencanaan pembangunan daerah,

pelaksanaan kajian strategis, dan pengembangan inovasi. Pelayanan publik yang prima menjadi bagian integral dari pencapaian tujuan organisasi, baik dalam menyusun kebijakan, mendukung OPD teknis, maupun melayani pemangku kepentingan pembangunan.

2.2.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD

Berdasarkan hasil analisis evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Bappedalitbang yang menjadi isu utama dalam pencapaian kinerja Bappedalitbang adalah :

1. Ketersediaan dan pemanfaatan data masih perlu ditingkatkan.
2. Pelaksanaan Kearsipan Internal Bappedalitbang belum optimal.
3. Sistem AKIP internal Bappedalitbang dengan adanya sistem penilaian yang baru perlu ditingkatkan.
4. Pencapaian indeks inovasi daerah perlu dioptimalkan
5. Menyusun strategi untuk mencapai target perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);

Rencana pembangunan daerah dapat dilihat dari cita-cita Kepala Daerah terpilih sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Cita-cita tersebut dapat dituangkan ke dalam visi yang kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai cara untuk mewujudkan visi tersebut.

Visi Kabupaten Blitar : KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA.

Dalam pencapaian visi Kabupaten Blitar periode 2025 - 2029 untuk mewujudkan Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya, Bappedalitbang Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada misi 3 : Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat. Dalam mencapai

tujuan tersebut terdapat 2 sasaran pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Bappedalitbang Kabupaten Blitar berperan aktif dalam mengintegrasikan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs. Selain itu, Bappedalitbang juga menyusun data baseline, indikator, serta target capaian daerah yang selaras dengan tujuan global. Adapun Dampaknya adalah

1. Mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan dimensi sosial, ekonomi, lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan daya tarik investasi dan kemitraan strategis, baik dengan sektor swasta, LSM, maupun lembaga donor internasional.
3. Memberikan kontribusi nyata Kabupaten Blitar terhadap pencapaian target SDGs nasional dan global, antara lain: No Poverty (Tanpa Kemiskinan), Quality Education (Pendidikan Berkualitas), Decent Work and Economic Growth (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)

2.2.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Bappedalitbang Kabupaten Blitar menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan strategis, sekaligus memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perannya sebagai institusi perencanaan, pengendali, serta penggerak inovasi pembangunan daerah di antaranya :

1. Keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dalam bidang perencanaan, penelitian, dan

pemanfaatan teknologi informasi, menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan.

2. Belum optimalnya integrasi data lintas sektor, menghambat ketersediaan data yang valid dan komprehensif sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
3. Kurangnya inovasi dalam pelayanan publik menjadikan layanan belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
4. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional di bidang perencanaan dan pengukuran kinerja menuntut adanya penyesuaian cepat dari perangkat daerah agar tetap relevan dan patuh terhadap aturan.
5. Rendahnya partisipasi pemangku kepentingan, baik dari internal pemerintah daerah maupun masyarakat luas, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

Dlsamping dengan tantangan tersebut bappedalitbang Kabupaten Blitar memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perannya sebagai institusi perencana, pengendali, serta penggerak inovasi pembangunan daerah antra lain :

1. Dukungan kuat dari kebijakan nasional, terutama dalam transformasi perencanaan berbasis data dan inovasi, menjadi modal penting bagi penguatan peran kelembagaan Bappedalitbang.
2. Pemanfaatan teknologi digital memberikan peluang besar dalam mempercepat proses layanan, menyederhanakan pengolahan data, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.
3. Terbukanya ruang kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan, LSM, dan sektor swasta memungkinkan kolaborasi yang produktif dalam pengembangan riset dan inovasi daerah.
4. Potensi penguatan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) berbasis kinerja, mendukung terwujudnya perbaikan

berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

5. Kesempatan untuk mengintegrasikan program-program global, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Smart City, membuka peluang pembiayaan tambahan dan kerja sama internasional.

2.2.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan memperkuat peran strategis Bappedalitbang Kabupaten Blitar sebagai motor perencanaan dan inovasi, diperlukan identifikasi dan formulasi isu-isu penting yang berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program. Isu-isu ini menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi dan catatan strategis sebagai landasan kebijakan dan perumusan kegiatan prioritas tahun yang akan datang. Adapun beberapa isu penting yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut antara lain:

1. Ketersediaan dan pemanfaatan data yang belum optimal, sehingga perlu didorong penguatan sistem data terpadu dan pengembangan dashboard informasi pembangunan yang terintegrasi.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, yang perlu disinergikan melalui penguatan sistem perencanaan berbasis kinerja serta penyempurnaan instrumen monitoring dan evaluasi.
3. Rendahnya kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan inovasi daerah, yang perlu dijawab dengan mendorong forum kolaboratif antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
4. Belum optimalnya pencapaian indikator prioritas daerah dan nasional, seperti Indeks Inovasi Daerah, SPM, dan SDGs, yang memerlukan program intervensi terfokus dan berbasis data.

5. Kurangnya integrasi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran, yang dapat diatasi melalui peningkatan kualitas perencanaan teknokratik dan penguatan kapasitas perencana di setiap OPD.

Catatan strategis ini diharapkan menjadi pijakan utama dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas Bappedalitbang Kabupaten Blitar yang lebih terarah, adaptif, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD sampai dengan Triwulan I

Untuk menetapkan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 diperlukan analisis hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bappedalitbang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD.

Berikut tabel hasil evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bappedalitbang sampai dengan Tahun 2025

Tabel 2.2
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Blitar
Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Periode Pelaksanaan 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar yang mengacu pada sasaran RKPD

| No | Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 | | | Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|------------------|---------------------------------|------------------|----|------------------|------|------|----|------------------|--|-------|--|-------------------|--|--------|----------------------|--|----|--|--|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=(12/7)*100% | | 14=6+12 | | 15=(14/5)*100% Rp=14 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Kr | Rp | K | Rp | Ki | Kr | Rp | | |
| 1 | 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | 27.675.269.787,00 | 100 | 17.858.592.717,00 | 100 | 6.329.909.183,00 | 80 | 1.469.375.724,00 | 80 | 1.391.194.920,00 | 0,00 | 0,00 | 80 | 2.860.570.644,00 | 90,00 | 45,19 | 90,00 | 20.719.163.361,00 | 90,00 | 90,00 | 20.719.163.361,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | |
| 2 | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan | 113 | 137.510.676,00 | 77 | 74.402.500,00 | 25 | 15.652.600,00 | 8 | 3.315.000,00 | 9 | 2.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 | 5.525.000,00 | 83,19 | 35,30 | 94 | 79.927.500,00 | 83,19 | 58,12 | 79.927.500,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | |
| 3 | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 113 | 137.510.676,00 | 77 | 74.402.500,00 | 25 | 15.652.600,00 | 8 | 3.315.000,00 | 9 | 2.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 | 5.525.000,00 | 83,19 | 35,30 | 94 | 79.927.500,00 | 83,19 | 58,12 | 79.927.500,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | |
| 4 | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu | 60 | 19.759.857.351,00 | 36 | 11.586.821.447,00 | 12 | 4.139.683.540,00 | 3 | 1.116.304.294,00 | 3 | 1.136.736.888,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 2.253.041.182,00 | 70,00 | 54,43 | 42 | 13.839.862.629,00 | 70,00 | 70,04 | 13.839.862.629,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | |
| 5 | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 | 19.502.937.351,00 | 29 | 10.888.160.700,00 | 31 | 4.121.803.540,00 | 31 | 1.111.834.294,00 | 31 | 1.132.266.888,00 | 0,00 | 0,00 | 31 | 2.244.101.182,00 | 100,00 | 54,44 | 30,00 | 13.132.261.882,00 | 100,00 | 67,33 | 13.132.261.882,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | |
| 6 | 5.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 60 | 256.920.000,00 | 60 | 698.660.747,00 | 12 | 17.880.000,00 | 3 | 4.470.000,00 | 3 | 4.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 8.940.000,00 | 110,00 | 50,00 | 66 | 707.600.747,00 | 110,00 | 275,42 | 707.600.747,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | |
| 7 | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | 60 | 1.708.440.000,00 | 36 | 776.467.163,00 | 12 | 40.000.000,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 42 | 776.467.163,00 | 70,00 | 45,45 | 776.467.163,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | |

| No | Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 | | Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | | | |
|----|-------------------|--|---|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|---------------|---|----------------|----|------|----|------|--|----------------|--|-------|--|------------------|--|--------|------------------|--|------|-----|----------------|--------|------------------|---|---|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=(12/7)*100% | | 14=6+12 | | 15=(14/5)*100% Rp=14 | | | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Kr | Rp | K | Rp | Ki | Kr | Rp | | | | | | | | |
| 8 | 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 140 | 1.708.440.000,00 | 126 | 776.467.163,00 | 31 | 40.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 90,00 | 0,00 | 126 | 776.467.163,00 | 90,00 | 45,45 | 776.467.163,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 9 | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel | 60 | 4.162.331.760,00 | 36 | 3.535.947.530,00 | 12 | 1.126.818.587,00 | 3 | 77.069.768,00 | 3 | 132.657.537,00 | | 0,00 | | 0,00 | 6 | 209.727.305,00 | 70,00 | 18,61 | 42 | 3.745.674.835,00 | 70,00 | 89,99 | 3.745.674.835,00 | 70,00 | | | | 89,99 | 3.745.674.835,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |
| 10 | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | 17.755.000,00 | 100 | 12.127.800,00 | 1 | 6.768.050,00 | 1 | 1.235.400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 1.235.400,00 | 10100,00 | 18,25 | 101 | 13.363.200,00 | 10100,00 | 75,26 | 13.363.200,00 | 10100,00 | | | | 75,26 | 13.363.200,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |
| 11 | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 | 621.087.400,00 | 100 | 1.020.639.110,00 | 1 | 322.038.016,00 | | 0,00 | 1 | 27.649.776,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 27.649.776,00 | 5050,00 | 8,59 | 101 | 1.048.288.886,00 | 5050,00 | 168,78 | 1.048.288.886,00 | 5050,00 | | | | 168,78 | 1.048.288.886,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |
| 12 | 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 | 111.189.400,00 | 75 | 64.899.720,00 | 1 | 27.165.450,00 | | 0,00 | 1 | 4.395.600,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 4.395.600,00 | 3800,00 | 16,18 | 76 | 69.295.320,00 | 3800,00 | 62,32 | 69.295.320,00 | 3800,00 | | | | 62,32 | 69.295.320,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |
| 13 | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 | 63.176.000,00 | 100 | 47.851.000,00 | 1 | 16.678.250,00 | 1 | 1.640.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 1.640.500,00 | 10100,00 | 9,84 | 101 | 49.491.500,00 | 10100,00 | 78,34 | 49.491.500,00 | 10100,00 | | | | 78,34 | 49.491.500,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |
| 14 | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 324.785.000,00 | 100 | 353.533.500,00 | 1 | 62.277.100,00 | 1 | 3.461.150,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 3.461.150,00 | 10100,00 | 5,56 | 101 | 356.994.650,00 | 10100,00 | 109,92 | 356.994.650,00 | 10100,00 | | | | 109,92 | 356.994.650,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |
| 15 | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 60 | 312.500.000,00 | 70 | 125.043.600,00 | 12 | 1.500.000,00 | | 0,00 | 1 | 750.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 750.000,00 | 118,33 | 50,00 | 71 | 125.793.600,00 | 118,33 | 40,25 | 125.793.600,00 | 118,33 | | | | 40,25 | 125.793.600,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |
| 16 | 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5 | 0,00 | 5 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |

| No | Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 | | Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-------------------|---|--|--|------------------|--|------------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|------|---------------|------|------|------|----------------|--|-------|--|------------------|--|--------|--|---|---|--|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=(12/7)*100% | | 14=6+12 | | 15=(14/5)*100% Rp=14 | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Kr | Rp | K | Rp | Ki | Kr | Rp | |
| 17 | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 800 | 2.711.838.960,00 | 96 | 1.911.852.800,00 | 280 | 690.391.721,00 | 34 | 70.732.718,00 | 46 | 99.862.161,00 | 0,00 | 0,00 | 80 | 170.594.879,00 | 22,00 | 24,71 | 176 | 2.082.447.679,00 | 22,00 | 76,79 | 2.082.447.679,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | |
| 18 | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 60 | 1.166.264.000,00 | 36 | 1.302.572.939,00 | 12 | 319.157.856,00 | 3 | 85.791.662,00 | 3 | 79.051.195,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 164.842.857,00 | 70,00 | 51,85 | 42 | 1.467.415.796,00 | 70,00 | 125,82 | 1.467.415.796,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | |
| 19 | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | 30.000.000,00 | 60 | 8.370.989,00 | 12 | 3.930.000,00 | 3 | 383.662,00 | 3 | 363.663,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 747.325,00 | 110,00 | 19,02 | 66 | 9.118.314,00 | 110,00 | 30,39 | 9.118.314,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | |
| 20 | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 55 | 1.136.264.000,00 | 65,45 | 1.294.201.950,00 | 12 | 315.227.856,00 | 3 | 85.408.000,00 | 3 | 78.687.532,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 164.095.532,00 | 129,91 | 52,06 | 71,45 | 1.458.297.482,00 | 129,91 | 128,34 | 1.458.297.482,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | |
| 21 | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 60 | 740.866.000,00 | 36 | 582.381.138,00 | 12 | 688.596.600,00 | 3 | 186.895.000,00 | 3 | 40.539.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 227.434.300,00 | 70,00 | 33,03 | 42 | 809.815.438,00 | 70,00 | 109,31 | 809.815.438,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | |
| 22 | 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |
| 23 | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 150 | 345.415.000,00 | 71,33 | 332.791.138,00 | 13 | 255.556.600,00 | 3 | 175.307.000,00 | 3 | 25.479.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 200.786.300,00 | 51,55 | 78,57 | 77,33 | 533.577.438,00 | 51,55 | 154,47 | 533.577.438,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | |
| 24 | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 500 | 395.451.000,00 | 54,20 | 249.590.000,00 | 127 | 82.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 15.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 15.060.000,00 | 11,04 | 18,18 | 55,2 | 264.650.000,00 | 11,04 | 66,92 | 264.650.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | |
| 25 | 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 350.200.000,00 | 1 | 11.588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 11.588.000,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 11.588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.588.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | |

| No | Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 | | Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-------------------|---|--|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|--|---|------------------|---|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=(12/7)*100% | | 14=6+12 | | 15=(14/5)*100% Rp=14 | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Kr | Rp | K | Rp | Ki | Kr | Rp | |
| 26 | 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Tingkat pemanfaatan data Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah | 70 100 45 | 6.760.860.084,00 | 56 100 27 | 7.385.500.563,00 | 70 90 9 | 1.863.282.750,00 | 56 0 3 | 173.405.500,00 | 56 100 2 | 242.187.850,00 | 0 0 0 | 0,00 | 0 0 0 | 0,00 | 56 100 5 | 415.593.350,00 | 83,70 | 22,30 | 56,00 100,00 32 | 7.801.093.913,00 | 80,00 100,00 71,11 | 83,70 | 7.801.093.913,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 27 | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan | 100 | 3.160.924.384,00 | 100 | 2.627.093.663,00 | 100 | 1.392.690.950,00 | 100 | 120.500.000,00 | 231.178.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 351.678.850,00 | 100,00 | 25,25 | 100,00 | 2.978.772.513,00 | 100,00 | 94,24 | 2.978.772.513,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | |
| 28 | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 5 | 384.092.683,00 | 5 | 137.107.250,00 | 2 | 25.290.200,00 | 1 | 24.588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 24.588.000,00 | 120,00 | 97,22 | 6 | 161.695.250,00 | 120,00 | 42,10 | 161.695.250,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | |
| 29 | 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 1 | 57.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 215.437.500,00 | 1 | 18.400.000,00 | 1 | 22.595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 40.995.000,00 | 19,03 | | 40.995.000,00 | | 71,92 | 40.995.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | |
| 30 | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 5 | 885.339.842,00 | 3 | 363.442.925,00 | 2 | 145.854.600,00 | | 0,00 | 1 | 144.211.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 144.211.850,00 | 80,00 | 98,87 | 4 | 507.654.775,00 | 80,00 | 57,34 | 507.654.775,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | |
| 31 | 5.01.02.2.01.0006 | Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | 550 | 547.172.450,00 | 660 | 161.498.250,00 | 550 | 70.480.000,00 | 550 | 69.906.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 | 69.906.000,00 | 220,00 | 99,19 | 1210 | 231.404.250,00 | 220,00 | 42,29 | 231.404.250,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | |
| 32 | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 25 | 1.287.319.409,00 | 18 | 1.965.045.238,00 | 7 | 935.628.650,00 | 2 | 7.606.000,00 | 2 | 64.372.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 71.978.000,00 | 88,00 | 7,69 | 22 | 2.037.023.238,00 | 88,00 | 158,24 | 2.037.023.238,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | |
| 33 | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat keterisian data SIPD | 70 | 1.299.935.700,00 | 56 | 874.545.685,00 | 56 | 322.836.500,00 | | 5.928.000,00 | 8.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.348.000,00 | 40,00 | 4,44 | 28,00 | 888.893.685,00 | 40,00 | 68,38 | 888.893.685,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | |
| 34 | 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | 70 | 739.937.000,00 | 150 | 589.875.815,00 | 53 | 262.766.900,00 | 22 | 5.928.000,00 | 8.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | 14.348.000,00 | 245,71 | 5,46 | 172 | 604.223.815,00 | 245,71 | 81,66 | 604.223.815,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | |

| No | Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 | | Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | | |
|----|-------------------|--|--|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|----|------|----|------|--|---------------|--|-------|--|------------------|--|----------------|------------------|--|----------------|---|---|-------|----------------|---|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=(12/7)*100% | | 14=6+12 | | 15=(14/5)*100% Rp=14 | | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Kr | Rp | K | Rp | Ki | Kr | Rp | | | | | | | |
| 35 | 5.01.02.2.02.0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | 2 | 559.998.700,00 | 3 | 284.669.870,00 | 1 | 60.069.600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 3 | 284.669.870,00 | 150,00 | 50,83 | 284.669.870,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 36 | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah | 45 | 2.300.000.000,00 | 27 | 3.883.861.215,00 | 9 | 147.755.300,00 | 3 | 46.977.500,00 | 2 | 2.589.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 5 | 49.566.500,00 | 71,11 | 33,55 | 32 | 3.933.427.715,00 | 71,11 | 171,02 | 3.933.427.715,00 | 71,11 | 171,02 | 3.933.427.715,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | |
| 37 | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 20 | 800.000.000,00 | 12 | 220.177.071,00 | 8 | 16.426.100,00 | 2 | 725.000,00 | 2 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4 | 725.000,00 | 80,00 | 4,41 | 16 | 220.902.071,00 | 80,00 | 27,61 | 220.902.071,00 | 80,00 | 27,61 | 220.902.071,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | |
| 38 | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 20 | 1.500.000.000,00 | 96 | 3.663.684.144,00 | 5 | 131.329.200,00 | 2 | 46.252.500,00 | 1 | 2.589.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3 | 48.841.500,00 | 495,00 | 37,19 | 99 | 3.712.525.644,00 | 495,00 | 247,50 | 3.712.525.644,00 | 495,00 | 247,50 | 3.712.525.644,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | |
| 39 | 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase indikator program PD yang tercapai | 100 | 6.603.207.900,00 | 96,23 | 3.663.684.144,00 | 92 | 1.091.651.025,00 | 96,23 | 27.909.517,00 | | 70.171.526,00 | | 0,00 | | 0,00 | 96,23 | 98.081.043,00 | 96,23 | 8,98 | 96,23 | 3.761.765.187,00 | 96,23 | 96,23 | 3.761.765.187,00 | 96,23 | 96,23 | 3.761.765.187,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | |
| 40 | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase indikator program PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 100 | 1.983.271.900,00 | 98,14 | 994.576.903,00 | 92 | 467.222.525,00 | | 11.668.799,00 | | 42.035.995,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 53.704.794,00 | 49,07 | 11,49 | 49,07 | 1.048.281.697,00 | 49,07 | 52,86 | 1.048.281.697,00 | 49,07 | 52,86 | 1.048.281.697,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | |
| 41 | 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | 340 | 69.162.500,00 | 267 | 123.912.206,00 | 195 | 0,00 | 9 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 9 | 0,00 | 81,18 | 276 | 123.912.206,00 | 81,18 | 179,16 | 123.912.206,00 | 81,18 | 179,16 | 123.912.206,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | | |
| 42 | 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 65 | 487.471.750,00 | 136 | 289.777.627,00 | 98 | 98.774.672,00 | | 4.660.799,00 | 66 | 4.303.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 66 | 8.963.799,00 | 310,77 | 9,07 | 202 | 298.741.426,00 | 310,77 | 61,28 | 298.741.426,00 | 310,77 | 61,28 | 298.741.426,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | |
| 43 | 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | 50 | 597.924.500,00 | 171 | 34.834.029,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 342,00 | 171 | 34.834.029,00 | 342,00 | 5,83 | 34.834.029,00 | 342,00 | 5,83 | 34.834.029,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | | |

| No | Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 | | Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|----|-------------------|--|---|--|------------------|--|------------------|--|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|------|------|--------------|--|--|-------|--|------------------|--|----------------|---|---|----|----|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | | 12 | | 13=(12/7)*100% | | 14=6*12 | | 15=(14/5)*100% Rp=14 | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | Kr | Rp | K | Rp | Ki | | Kr | Rp |
| 44 | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 25 | 828.713.150,00 | 45 | 546.053.041,00 | 26 | 368.447.853,00 | | | 7.008.000,00 | 13 | 37.732.995,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 44.740.995,00 | 232,00 | 12,14 | 58 | 590.794.036,00 | 232,00 | 71,29 | 590.794.036,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | |
| 45 | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase indikator program PD mitra bidang perekonomian dan SDA | 100 | 2.821.036.000,00 | 87,5 | 1.289.844.949,00 | 92 | 437.038.700,00 | | | 6.957.000,00 | | 15.291.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 22.248.500,00 | 43,75 | 5,09 | 43,75 | 1.312.093.449,00 | 43,75 | 46,51 | 1.312.093.449,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | |
| 46 | 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 60 | 425.750.000,00 | 73 | 191.871.500,00 | 29 | 141.911.600,00 | 4 | 1.869.000,00 | 12 | 918.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 | 2.787.500,00 | 148,33 | 1,96 | 89 | 194.659.000,00 | 148,33 | 45,72 | 194.659.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | |
| 47 | 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 30 | 715.000.000,00 | 23 | 377.900.511,00 | 8 | 23.020.000,00 | | | 2.838.000,00 | 4 | 1.483.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4.321.000,00 | 90,00 | 18,77 | 27 | 382.221.511,00 | 90,00 | 53,46 | 382.221.511,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | |
| 48 | 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 10 | 343.750.000,00 | 38 | 79.834.704,00 | 15 | 215.490.000,00 | 2 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 46 | 79.834.704,00 | 460,00 | 23,22 | 79.834.704,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | |
| 49 | 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | 5 | 1.336.536.000,00 | 9 | 640.238.234,00 | 4 | 56.617.100,00 | | | 2.250.000,00 | 2 | 12.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 15.140.000,00 | 220,00 | 26,74 | 11 | 655.378.234,00 | 220,00 | 49,04 | 655.378.234,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | |
| 50 | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase indikator program PD mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan | 100 | 1.798.900.000,00 | 94,44 | 1.379.262.292,00 | 92 | 187.389.800,00 | | | 9.283.718,00 | | 12.844.031,00 | 0,00 | 0,00 | | 22.127.749,00 | 47,22 | 11,81 | 47,22 | 1.401.390.041,00 | 47,22 | 77,90 | 1.401.390.041,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | |
| 51 | 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 20 | 200.000.000,00 | 32 | 481.016.711,00 | 15 | 63.492.000,00 | 2 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 40 | 481.016.711,00 | 200,00 | 240,51 | 481.016.711,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | |

| No | Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 | | Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|-------------------|--|---|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--|---------------|--|-------|--|------------------|--|--------|------------------|---|---|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=(12/7)*100% | | 14=6+12 | | 15=(14/5)*100% Rp=14 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Kr | Rp | K | Rp | Ki | Kr | Rp | | |
| 52 | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 10 | 475.200.000,00 | 10 | 466.610.791,00 | 4 | 64.635.300,00 | | 0,00 | 2 | 12.184.031,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 | 12.184.031,00 | 120,00 | 18,85 | 12 | 478.794.822,00 | 120,00 | 100,76 | 478.794.822,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |
| 53 | 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 30 | 648.500.000,00 | 62 | 177.676.685,00 | 29 | 27.446.500,00 | 4 | 7.293.718,00 | 12 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 16 | 7.293.718,00 | 260,00 | 26,57 | 78 | 184.970.403,00 | 260,00 | 28,52 | 184.970.403,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |
| 54 | 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 15 | 475.200.000,00 | 19 | 253.958.105,00 | 8 | 31.816.000,00 | | 1.990.000,00 | 4 | 660.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4 | 2.650.000,00 | 153,33 | 8,33 | 23 | 256.608.105,00 | 153,33 | 54,00 | 256.608.105,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |
| 55 | 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah | 25 | 3.872.620.595,00 | 100 | 4.338.675.513,00 | 75 | 1.318.057.000,00 | | 27.302.753,00 | | 39.201.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 66.503.753,00 | 0,00 | 5,05 | | 4.405.179.266,00 | 0,00 | 0,00 | 4.405.179.266,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |
| 56 | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | persentase hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah | 75 75 | 603.500.000,00 | 100 100 | 1.655.488.169,00 | 75 75 | 725.202.000,00 | 0 0 | 9.263.919,00 | 0 0 | 5.786.000,00 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0 0 | 0,00 0,00 | | 15.049.919,00 | 66,67 | 2,08 | 50,00 50,00 | 1.670.538.088,00 | 66,67 66,67 | 276,81 | 1.670.538.088,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |
| 57 | 5.05.02.2.01.0002 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | 5 | 188.500.000,00 | 4 | 1.655.488.169,00 | 2 | 330.202.000,00 | | 9.263.919,00 | 1 | 5.786.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 15.049.919,00 | 100,00 | 4,56 | 5 | 1.670.538.088,00 | 100,00 | 886,23 | 1.670.538.088,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |
| 58 | 5.05.02.2.01.0003 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | 1 | 415.000.000,00 | | 0,00 | 3 | 395.000.000,00 | | 0,00 | 1 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 59 | 5.05.02.2.01.0004 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 60 | 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |

| No | Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 | | | | Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|-------------------|--|---|--|------------------|--|------------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|---|---------------|----|------|----|------|--|---------------|--|-------|--|------------------|-------|--------|--|------|------|--|---|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=(12/7)*100% | | 14=6+12 | | | | 15=(14/5)*100% Rp=14 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Kr | Rp | K | Rp | Ki | Kr | Rp | | | | |
| 61 | 5.05.02.2.01.0014 | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | | 0,00 | 1 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 62 | 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | persentase hasil penelitian bidang sosial kependudukan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah | 75 | 150.000.000,00 | 100 | 0,00 | 75 | 150.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 66,67 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 66,67 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 63 | 5.05.02.2.02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | 1 | 150.000.000,00 | | 0,00 | 1 | 150.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 64 | 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | persentase hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah | 75 | 150.000.000,00 | 100 | 0,00 | 75 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 66,67 | | 50,00 | | 0,00 | 66,67 | | 0,00 | | 0,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 65 | 5.05.02.2.03.0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1 | 150.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 66 | 5.05.02.2.03.0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 67 | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Persentase hasil kelibangan dan inovasi yang dikembangkan lebih lanjut | 100 | 2.969.120.595,00 | 100 | 2.683.187.344,00 | 100 | 442.855.000,00 | | 18.038.834,00 | | 33.415.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 51.453.834,00 | 50,00 | 11,62 | 50,00 | 2.734.641.178,00 | 50,00 | 92,10 | 2.734.641.178,00 | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 68 | 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 5 | 1.435.875.595,00 | 3 | 1.544.872.444,00 | 1 | 135.975.000,00 | | 0,00 | | 17.715.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 17.715.000,00 | 60,00 | 13,03 | 3 | 1.562.587.444,00 | 60,00 | 108,82 | 1.562.587.444,00 | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 69 | 5.05.02.2.04.0002 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 5 | 1.008.245.000,00 | 4 | 622.282.400,00 | 1 | 181.880.000,00 | | 15.553.000,00 | | 15.700.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 31.253.000,00 | 80,00 | 17,18 | 4 | 653.535.400,00 | 80,00 | 64,82 | 653.535.400,00 | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |

| No | Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 | | Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | |
|--|-------------------|--|---|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|----|-------------|----|-------------|--|--|--|--------------|--|--------------------------|---------|--|----------------------|--------------------------|---------------|---|---|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | | | 12 | | 13=(12/7)*100% | | 14=6+12 | | 15=(14/5)*100% Rp=14 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | Kr | Rp | K | | Rp | Ki | Kr | Rp | |
| 70 | 5.05.02.2.04.0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 5 | 500.000.000,00 | 3 | 419.950.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 60,00 | | 3 | 419.950.000,00 | 60,00 | 83,99 | 419.950.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 71 | 5.05.02.2.04.0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan | 5 | 25.000.000,00 | 2 | 96.082.500,00 | 1 | 125.000.000,00 | | 2.485.834,00 | 1 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 2.485.834,00 | 60,00 | 1,99 | 3 | 98.568.334,00 | 60,00 | 394,27 | 98.568.334,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |
| 72 | 5.05.02.2.04.0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |
| TOTAL | | | | | 44.911.958.366,00 | | 33.246.452.937,00 | | 10.602.899.958,00 | | 1.697.993.494,00 | | 1.742.755.296,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.440.748.790,00 | | 81,53 | | 36.687.201.727,00 | | | | 36.687.201.727,00 | | | |
| Rata-rata Capaian Kinerja Program | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67,48% | 90,24% | | | | |
| Predikat Kinerja Program | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sedang | Tinggi | | | | |
| <p>Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :</p> <p>5.01.5.05.0.00.01.0000. 5.01.02. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH dokumen perencanaan dapat selesai tepat waktu</p> <p>5.01.5.05.0.00.01.0000. 5.01.03. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Realisasi program perangkat daerah mengalami peningkatan</p> <p>5.01.5.05.0.00.01.0000. 5.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Realisasi per triwulan sudah tercapai 80 persen karena ada satu kegiatan belum terlaksana yaitu bimtek</p> <p>5.01.5.05.0.00.01.0000. 5.05.02. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH kegiatan tahun sebelumnya dapat direalisasikan 100%</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :</p> <p>5.01.5.05.0.00.01.0000. 5.01.02. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH pendanaan prioritas pembangunan daerah dapat dihitung ketika dokumen perencanaan selesai dilaksanakan</p> <p>5.01.5.05.0.00.01.0000. 5.01.03. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase indikator program PD yang tercapai dapat dihitung pada akhir periode LKPJ dan LKIPJ selesai</p> <p>5.01.5.05.0.00.01.0000. 5.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA belum terlaksananya kegiatan bimtek kepegawain</p> <p>5.01.5.05.0.00.01.0000. 5.05.02. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Dapat dihitung capainnya pada akhir tahun periode</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</p> <p>5.01.5.05.0.00.01.0000. 5.01.02. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH percepatan penyelesaian renstra 2025-2029</p> <p>5.01.5.05.0.00.01.0000. 5.01.03. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH melakukan sinkronisasi dengan renstra 2025-2029</p> <p>5.01.5.05.0.00.01.0000. 5.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencukupi kebutuhan bappedalibang</p> <p>5.01.5.05.0.00.01.0000. 5.05.02. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Realisasi pekerjaan beum dapat terisikan karena masih proses pelaksanaan kegiatan dan belum final sehingga belum dilaporkan</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPDP berikutnya :</p> <p>5.01.5.05.0.00.01.0000. 5.01.02. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH penyesuaian RKPDP 2026 dengan RPJMD 2025-2029</p> <p>5.01.5.05.0.00.01.0000. 5.01.03. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH melakukan sinkronisasi dengan RPJMD 2025-2029</p> <p>5.01.5.05.0.00.01.0000. 5.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA merencanakan kebutuhan anggaran untuk mengoptimalkan kinerja</p> <p>5.01.5.05.0.00.01.0000. 5.05.02. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH melakukan sinkronisasi dengan renstra dan RPJMD 2025-2029</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar pada Tahun 2025 melaksanakan 4 program, 16 kegiatan dan 52 Sub Kegiatan. Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran dari pelaksanaan Renja tahun 2025 sampai dengan tribulan I tersebut secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada Urusan pemerintahan daerah (100%) telah tercapai sebesar 90%. Pada program ini terdiri dari :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan dan target (25 dokumen) telah terealisasi sebanyak 8 dokumen.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah target (25 dokumen) telah terealisasi sebanyak 8 dokumen.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu target (12 dokumen) telah terealisasi sebanyak 3 (tiga) dokumen.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan (31 orang) sudah terealisasi setiap bulannya
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD (12 dokumen) telah terealisasi 3 dokumen.
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (31 orang) sudah terealisasi semua.
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (31 orang) sudah terealisasi 0 orang.
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel (12 bulan) sudah terealisasi 3 bulan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (1 jenis) sudah terealisasi semua.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 jenis) yang terealisasi 0 jenis namun pemenuhan volumenya masih 0%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indicator Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (1 jenis) yang teralisasi 0 jenis dengan volume masih 0%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indicator Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (1 jenis) telah terealisasi 1 jenis volume masih 100%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (1 paket) sudah terealisasi 1 paket.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (12 paket) telah teralisasi 0%.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (12 bulan) sudah teralisasi 3 bulan.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12 bulan) sudah teralisasi 3 bulan.
- Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator Jumlah waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan target 12 bulan terealisasi 3 bulan.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator Jumlah peralatan dan mesin lainnya mesin yang terpelihara (127 unit) sudah terealisasi 0 %.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator Jumlah pemeliharaan Gedung kantor yang dilaksanakan 1 paket masih proses pengerjaan.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12 bulan) telah terealisasi 3 bulan.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (12 bulan) telah terealisasi 3 bulan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik(12 bulan) sudah terealisasi 3 bulan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (12 bulan) sudah terealisasi 3 bulan.
2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah (90%), Tingkat Pemanfaatan data (70%), dan Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah (7 dokumen) masih belum teralisasi karena pelaksanaan penghitungan dijadwalkan pada Semester II. Tetapi sampai dengan tahun 2024 sudah tercapai 100% untuk Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah dan 70% untuk Tingkat Pemanfaatan data, dan Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah masih tercapai 3 dokumen untuk tahun 2025.
- a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan indikator Persentase Pendanaan Program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah (90%) telah tercapai 100% pada tahun 2024 dan 2025 masih proses perhitungan.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi publik dengan indikator Jumlah kegiatan konsultasi public RPJPD dan RPJMD telah terlaksana.
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD dengan indikator Jumlah rapat/koordinasi yang dilakukan 1 kali pada setelah pelaksanaan musrenbang dan 1 kali akhir tahun persiapan musrenbang tahun depan.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dan Sub kegiatan bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan dengan indikator jumlah usulan yang terverifikasi oleh kecamatan sebanyak 550 usulan.

- b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Tingkat Keterisian data di SIPD (65%) dapat dihitung akhir tahun.
 - Sub Kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD dengan indikator Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi masih akan dilaksanakan.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah dokumen (1 dokumen) masih proses penyusunan profil daerah.
 - c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator Jumlah dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah (9 dokumen) masih tercapai 3 dokumen.
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Laporan yang disusun 8 laporan dan masih terlaksana 2 laporan.
 - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan dengan indikator Jumlah laporan dengan target 5 laporan sudah dilakukan evaluasi 2 laporan evaluasi dan 1 laporan LKPJ telah selesai.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase indikator program PD yang tercapai 85% dapat dihitung pada akhir tahun.
- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan indikator Persentase indikator program PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 92% dapat dihitung pada akhir tahun.
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan indikator Jumlah dokren pembangunan daerah yang dikoordinir penyusunannya dengan target 195 dokumen tercapai 9 dokumen.
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dengan indikator jumlah laporan hasil sinkronisasi dengan target 98 laporan tercapai 0 laporan.

- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan indikator Jumlah dokren pembangunan daerah yang dikoordinir penyusunannya dengan target 0 dokumen tercapai 0 dokumen.
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan indikator jumlah laporan hasil sinkronisasi dengan target 26 laporan tercapai 0 laporan.
- b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan indikator Persentase indikator program PD mitra bidang perekonomian dan SDA 92% dapat dihitung pada akhir tahun.
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan indikator Jumlah dokren pembangunan daerah yang dikoordinir penyusunannya dengan target 29 dokumen tercapai 4 dokumen.
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dengan indikator jumlah laporan hasil sinkronisasi dengan target 8 laporan tercapai 0 laporan.
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan indikator Jumlah dokren pembangunan daerah yang dikoordinir penyusunannya dengan target 15 dokumen tercapai 2 dokumen.
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dengan indikator jumlah laporan hasil sinkronisasi dengan target 4 laporan tercapai 0 laporan.
- c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan indikator Persentase indikator program PD mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan 92% dapat diitung pada akhir tahun.
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan indikator Jumlah dokren pembangunan daerah

yang dikoordinir penyusunannya dengan target 15 dokumen tercapai 2 dokumen.

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan indikator jumlah laporan hasil sinkronisasi dengan target 4 laporan tercapai 0 laporan.
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan indikator Jumlah dokren pembangunan daerah yang dikoordinir penyusunannya dengan target 29 dokumen tercapai 4 dokumen.
 - Jumlah laporan hasil sinkronisasi dengan target 8 laporan tercapai 4 laporan.
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator Persentase rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah 70% dapat dihitung pada akhir tahun. Seluruh kegiatan kajian dilitbang dapat dihitung pada Triwulan I setelah kajian selesai dilaksanakan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDALITBANG

3.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Memperhatikan hasil capaian kinerja dan pelaksanaan kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 hingga realisasi Triwulan II, serta mencermati perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi awal perencanaan, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian berupa pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, dan penyesuaian pagu indikatif, baik pada komponen yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan, pagu indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) mengalami penurunan dari semula sebesar Rp 11.588.516.146,- dari APBD Kabupaten Blitar Tahun 2025 menjadi Rp10.602.679.959,- dalam Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang Tahun 2025. Dengan demikian, terjadi penurunan sebesar Rp 2.547.634.797,-.

Dalam rangka menyesuaikan perencanaan dan penganggaran dengan dinamika pelaksanaan program serta capaian kinerja hingga pertengahan tahun berjalan, telah dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025. Penyesuaian ini mencakup baik kenaikan maupun penurunan pagu indikatif, sebagai respons atas kebutuhan riil perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Beberapa sub kegiatan mengalami peningkatan pagu anggaran, antara lain pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, yang mengalami penyesuaian untuk menyesuaikan kebutuhan belanja pegawai. Peningkatan juga terjadi pada kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, serta Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor, guna mendukung operasional kantor yang lebih optimal. Selain itu, terdapat penambahan anggaran pada kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Analisis Data dan Informasi, serta Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan, sebagai bentuk penguatan fungsi perencanaan berbasis data yang adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah.

Di sisi lain, terdapat pula sejumlah kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami penurunan pagu indikatif. Penyesuaian ini dilakukan untuk

mengoptimalkan alokasi anggaran terhadap kegiatan yang lebih prioritas dan berdampak langsung terhadap kinerja pembangunan. Di antaranya adalah penurunan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Konsultasi Publik, serta Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Daerah. Beberapa kegiatan koordinasi lintas bidang, seperti di bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Kewilayahan, juga mengalami pengurangan anggaran seiring dengan penyederhanaan pelaksanaan kegiatan dan efisiensi belanja serta sebagai tindaklanjut amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya perubahan tersebut, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Blitar dapat lebih fokus, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan daerah, serta tetap selaras dengan target kinerja dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Adapun rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mengalami penyesuaian pagu indikatif, baik berupa kenaikan maupun penurunan, disajikan dalam uraian berikut.

Tabel 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BLITARTAHUN 2025

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------|--------|--|-----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | 13.150.314.756,00 | 11.588.516.146,00 | 10.602.679.959,00 | -2.547.634.797,00 | | | | | | | 12.382.050.795,00 | |
| 5 | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | 13.150.314.756,00 | 11.588.516.146,00 | 10.602.679.959,00 | -2.547.634.797,00 | | | | | | | 12.382.050.795,00 | |
| 5.01 | | PERENCANAAN | | | | | | | 11.100.314.756,00 | 9.999.567.146,00 | 9.284.842.959,00 | -1.815.471.797,00 | | | | | | | 11.182.050.795,00 | |
| 1. | 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | | | | 100 % | 100 % | 6.621.557.905,00 | 6.055.549.094,56 | 6.329.909.183,56 | 353.492.890,00 | | | | | | | 6.975.050.795,00 | |
| | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan | | | | 25 dokumen | 25 Dokumen | 15.652.600,00 | 15.652.600,00 | 15.652.600,00 | 0,00 | | | | | | | 127.620.619,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | 127.620.619,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 15.652.600,00 | 15.652.600,00 | 15.652.600,00 | 0,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | 127.620.619,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu | | | | 12 dokumen | 12 dokumen | 4.552.367.071,00 | 4.064.857.998,00 | 4.139.683.540,00 | -412.683.531,00 | | | | | | | 4.647.430.176,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 31 Orang/bulan | 31 Orang/bulan | 4.534.487.071,00 | 4.046.977.998,00 | 4.121.803.540,00 | -412.683.531,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | | | | 4.629.550.176,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 17.880.000,00 | 17.880.000,00 | 17.880.000,00 | 0,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | 17.880.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | | | | 31 Orang | 31 Orang | 45.000.000,00 | 363.000.000,00 | 40.000.000,00 | -5.000.000,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 31 Orang | 31 Orang | 45.000.000,00 | 363.000.000,00 | 40.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | 300.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel | | | | 12 bulan | 12 bulan | 1.190.626.994,00 | 841.212.256,56 | 1.126.818.587,56 | -63.808.406,44 | | | | | | | 1.151.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.612.050,00 | 3.612.050,00 | 6.768.050,00 | 3.156.000,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | 4.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 1 Paket | 216.280.500,00 | 233.395.500,00 | 322.038.016,00 | 105.757.516,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | 165.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 27.202.000,00 | 27.165.450,00 | 27.165.450,00 | -36.550,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | 27.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 16.678.250,00 | 16.678.250,00 | 16.678.250,00 | 0,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | 17.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 69.277.100,00 | 62.277.100,00 | 62.277.100,00 | -7.000.000,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | 120.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | 2.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | 5 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 16.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 196 Laporan | 280 Laporan | 856.077.094,00 | 496.583.906,56 | 690.391.721,56 | -165.685.372,44 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 800.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | | 12 bulan | 12 bulan | 416.566.440,00 | 369.481.440,00 | 319.157.856,00 | -97.408.584,00 | | | - | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 416.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.895.000,00 | 3.930.000,00 | 3.930.000,00 | -1.965.000,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 6.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 410.671.440,00 | 365.551.440,00 | 315.227.856,00 | -95.443.584,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 410.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | | | | 12 bulan | 12 bulan | 401.344.800,00 | 401.344.800,00 | 688.596.600,00 | 287.251.800,00 | | | - | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 333.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 4 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | - | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 110.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 25 Unit | 13 Unit | 275.904.800,00 | 275.904.800,00 | 255.556.600,00 | -20.348.200,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 117.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 117 Unit | 127 Unit | 75.290.000,00 | 75.290.000,00 | 82.840.000,00 | 7.550.000,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 76.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50.150.000,00 | 50.150.000,00 | 350.200.000,00 | 300.050.000,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 2. | 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Tingkat pemanfaatan data Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah | | | | 90 70 9 % | 70 90 9 % | 2.785.000.000,00 | 2.270.000.000,44 | 1.863.282.750,44 | 148.000.000,00 | | | | | | | 2.933.000.000,00 | |
| | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan | | | | 90 persen | 90 persen | 2.272.515.600,00 | 1.811.083.200,44 | 1.392.690.950,44 | -879.824.649,56 | | | - | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 2.205.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | | | | 2 Berita Acara | 2 Berita Acara | 174.900.000,00 | 224.900.000,00 | 25.290.200,00 | -149.609.800,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 168.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | 1 Berita Acara | 3 Berita Acara | 57.000.000,00 | 81.000.000,00 | 215.437.500,00 | 158.437.500,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 42.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | 1 Berita Acara | 2 Berita Acara | 400.000.000,00 | 375.000.000,00 | 145.854.600,00 | -254.145.400,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 440.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.02.2.01.0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | | | | 220 Usulan | 550 Usulan | 112.400.000,00 | 114.800.000,00 | 70.480.000,00 | -41.920.000,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 105.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|--|--|------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 1.528.215.600,00 | 1.015.383.200,44 | 935.628.650,44 | -592.586.949,56 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 1.450.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |
| | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat keterisian data SIPD | | | | 65 persen | 65 persen | 201.396.800,00 | 225.663.200,00 | 322.836.500,00 | 121.439.700,00 | | | - | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 347.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |
| | 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | | | | 53 Orang | 53 Orang | 105.139.600,00 | 138.973.600,00 | 262.766.900,00 | 157.627.300,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 260.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |
| | 5.01.02.2.02.0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | | | | 1 Buku | 1 Buku | 96.257.200,00 | 86.689.600,00 | 60.069.600,00 | -36.187.600,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 87.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |
| | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah | | | | 9 dokumen | 9 dokumen | 311.087.600,00 | 233.253.600,00 | 147.755.300,00 | -163.332.300,00 | | | - | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 381.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |
| | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | | | | 4 Laporan | 8 Laporan | 126.087.600,00 | 57.253.600,00 | 16.426.100,00 | -109.661.500,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 146.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |
| | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 185.000.000,00 | 176.000.000,00 | 131.329.200,00 | -53.670.800,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 235.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |
| 3. | 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase indikator program PD yang tercapai | | | | 85 % | 92 % | 1.693.756.851,00 | 1.674.018.051,00 | 1.091.651.025,00 | -419.756.851,00 | | | | | | | 1.274.000.000,00 | | |
| | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase indikator program PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | | | | 85 persen | 92 persen | 572.880.851,00 | 524.380.851,00 | 467.222.525,00 | -105.658.326,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | - | | | 500.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 195 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | - | | | 40.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | | | | 62 Laporan | 98 Laporan | 167.094.845,00 | 118.594.845,00 | 98.774.672,00 | -68.320.173,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | - | | | 120.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 63 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |
| | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | | | | 18 Laporan | 26 Laporan | 405.786.006,00 | 405.786.006,00 | 368.447.853,00 | -37.338.153,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 310.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |
| | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase indikator program PD mitra bidang perekonomian dan SDA | | | | 85 persen | 92 persen | 442.909.400,00 | 600.005.400,00 | 437.038.700,00 | -5.870.700,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 295.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |
| | 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|--|--|------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 28 Dokumen | 29 Dokumen | 70.398.600,00 | 240.741.200,00 | 141.911.600,00 | 71.513.000,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 110.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Perekonomian | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 40.040.000,00 | 40.040.000,00 | 23.020.000,00 | -17.020.000,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 55.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 14 Dokumen | 15 Dokumen | 234.240.000,00 | 220.980.000,00 | 215.490.000,00 | -18.750.000,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 55.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang SDA | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 98.230.800,00 | 98.244.200,00 | 56.617.100,00 | -41.613.700,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 75.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | persentase indikator program PD mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan | | | | 85 persen | 91 persen | 677.966.600,00 | 549.631.800,00 | 187.389.800,00 | -490.576.800,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 479.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 14 Dokumen | 15 Dokumen | 385.588.000,00 | 350.984.000,00 | 63.492.000,00 | -322.096.000,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 120.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Infrastruktur | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 147.044.000,00 | 89.554.300,00 | 64.635.300,00 | -82.408.700,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 140.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 28 Dokumen | 28 Dokumen | 79.074.600,00 | 46.659.500,00 | 27.446.500,00 | -51.628.100,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 141.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Kewilayahan | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 66.260.000,00 | 62.434.000,00 | 31.816.000,00 | -34.444.000,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik | | | 78.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | 2.050.000.000,00 | 1.588.949.000,00 | 1.317.837.000,00 | -732.163.000,00 | | | | | | | 1.200.000.000,00 | |
| 1. | 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah | | | | 25 % | 75 % | 2.050.000.000,00 | 1.588.949.000,00 | 1.317.837.000,00 | -850.000.000,00 | | | | | | | 1.200.000.000,00 | |
| | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | persentase hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah | | | | 75 persen | 75 persen | 855.000.000,00 | 790.479.000,00 | 725.202.000,00 | -129.798.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 300.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.02.2.01.0002 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | | | | 1 Laporan | 2 Laporan | 440.000.000,00 | 395.479.000,00 | 330.202.000,00 | -109.798.000,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.02.2.01.0003 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|-------------------------|--|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | | | | 1 Laporan | 3 Laporan | 415.000.000,00 | 395.000.000,00 | 395.000.000,00 | -20.000.000,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.02.2.01.0004 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.02.2.01.0014 | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | persentase hasil penelitian bidang sosial kependudukan yang digunakan sebagai referensi dalam penumusan kebijakan pembangunan persentase hasil penelitian bidang sosial kependudukan yang digunakan sebagai referensi dalam penumusan kebijakan pembangunan daerah | | | | 75 persen | 75 persen | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.02.2.02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | persentase hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang digunakan sebagai referensi dalam penumusan kebijakan pembangunan daerah | | | | 75 persen | 75 persen | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.02.2.03.0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.02.2.03.0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Persentase hasil kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan lebih lanjut | | | | 100 persen | 100 persen | 895.000.000,00 | 498.470.000,00 | 442.635.000,00 | -452.365.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 600.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 220.000.000,00 | 171.810.000,00 | 135.975.000,00 | -84.025.000,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.02.2.04.0002 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 350.000.000,00 | 201.660.000,00 | 181.660.000,00 | -168.340.000,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

| 5.05.02.2.04.0003 | | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|--|--------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|
| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5.05.02.2.04.0004 | | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | | 1 Laporan | 3 Laporan | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5.05.02.2.04.0005 | | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| J U M L A H | | | | | | | | | 13.150.314.756,00 | 11.588.516.146,00 | 10.602.679.959,00 | -2.547.634.797,00 | | | | | | | 12.382.050.795,00 | |

Dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang Tahun 2025, terdapat dinamika anggaran yang signifikan di beberapa sub kegiatan. Perubahan ini mencerminkan proses penajaman prioritas serta efisiensi alokasi anggaran yang lebih strategis. Beberapa sub kegiatan mengalami penguatan, sementara yang lain dilakukan rasionalisasi berdasarkan capaian dan kebutuhan lapangan.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Mengalami kenaikan dari APBD sebesar Rp 74.705.533,00 dari Rp4.046.977.998,00 menjadi Rp 4.121.803.540,00. Kenaikkan ini sebagai dampak dari bertambahnya jumlah ASN.

2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan ASN

Mengalami penyesuaian dari Rp 363.000.000,00 menjadi Rp 40.000.000,00. Sebagai tindaklanjut amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Mengalami kenaikan sebesar Rp 88.642.516,00, dari Rp 233.395.500,00 menjadi Rp322.038.016,00. Peningkatan ini disebabkan karena kebutuhan operasional yang lebih tinggi untuk mendukung penguatan fasilitas pelayanan.

4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Mengalami lonjakan anggaran signifikan, naik sebesar Rp300.050.000 dari Rp50.150.000,00 menjadi Rp350.200.000,00. Adanya kebutuhan mendesak terkait perbaikan infrastruktur kantor yang berkaitan dengan aspek keselamatan kerja, kenyamanan pelayanan, atau efisiensi energi.

5. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah

Turun dari Rp 86.689.600,00 menjadi Rp 60.069.600,00. Karena pengumpulan data profil bisa dilakukan lebih efisien, dengan pemanfaatan basis data yang telah tersedia sebelumnya dan integrasi data antar perangkat daerah.

6. Sub Kegiatan Koordinasi Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Mengalami peningkatan cukup besar dari Rp81.000.000,00 menjadi Rp215.437.500,00. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memperkuat sinergi

antar OPD, terutama dalam menyusun dokumen perencanaan yang lintas sektor dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

7. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, UMKM

Anggaran sebesar Rp150 juta yang sebelumnya dialokasikan, dihapuskan dalam perubahan Renja. Sebagai tindaklanjut amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yaitu dengan membatasi belanja untuk kegiatan kajian yang tidak mendukung prioritas nasional.

8. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Teknologi dan Inovasi

Mengalami penurunan sebesar Rp36 juta, dari Rp171.810.000,00 menjadi Rp135.975.000,00. Sebagai tindaklanjut amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara keseluruhan, perubahan pagu sub kegiatan dalam dokumen Renja Perubahan 2025 mencerminkan strategi penajaman fokus kelembagaan. Kegiatan yang mendukung layanan dasar internal, penguatan sistem informasi, serta kegiatan yang mendukung koordinasi lintas sektor cenderung dipertahankan atau diperkuat. Sementara itu, kegiatan yang dinilai belum berdampak langsung atau dapat disubstitusi dengan pendekatan lain mengalami pengurangan bahkan penghapusan. Penyesuaian ini menjadi bentuk konkret adaptasi perencanaan terhadap dinamika fiskal daerah, perkembangan teknologi, dan perubahan kebutuhan strategis pembangunan Kabupaten Blitar.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Tahun 2025 disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional maupun daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025 ini menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025, sebagai bagian dari proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P).

Program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar

Dengan disusunnya dokumen Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025 diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja dan percepatan pencapaian tujuan serta sasaran strategis Bappedalitbang.

Blitar, 14 Juli 2025

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN BLITAR



Drs. RULLY WAHYU PRASETYOWANTO, ME.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750902 199412 1 002